

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum menjamin perlindungan hukum bagi kurator. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang kepailitan terdapat inkonsistensi antara beberapa pasal diantaranya Pasal 9 dan Pasal 16, akibatnya dapat mempengaruhi kinerja kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor. Pasal lain yang dapat menghambat kinerja kurator melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit terdapat pada Pasal 83 dan 127. Kemudian, Pasal 65 yang menyatakan bahwa hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, agar lebih dioptimalisasikan guna melindungi kurator dari tindakan-tindakan debitor, kreditor maupun pihak kepolisian.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat disampaikan yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah selayaknya direvisi atau diubah, sehingga adanya kejelasan mengenai siapa itu kurator, kedudukan dan

tanggung jawab kurator, hak imunitas, dan pembentukan dewan kode etik bersama. Maka dengan ini tujuan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam memberikan perlindungan hukum dapat terwujud.



Daftar Pustaka

Buku

Munir Fuady, 2014, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Imran Nating, 2004, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin,dkk, 2002, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenadamedia Grup, Jakarta

Bernadette Waluyo, 1999, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mandar maju, Bandung.

Andhika Prayoga, 2014, Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut), Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, Pokok-Pokok HUKUM BISNIS, Salemba Empat, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2013, Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik, PT Alumni, Bandung.

Jono, 2010, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sylvia Janisriwati, 2011, Kepailitan Bank Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank, LoGoZ Publishing, Bandung.

Dijan Widijowati, 2012, Hukum Dagang, Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hasil Wawancara

Hakim Pudjo Hunggul H, S.H.,MH, 12 Mei 2016, Hakim Pengadilan Negeri Semarang

\

.

Jurnal

Sabarudin Hulu, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Kongkuren Atas Pernyataan Pailit Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan ketiga, Balai Pustaka. Jakarta.

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh>. Diunduh pada tanggal 27 Juni 2016..

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5093a08c177a1/revisi-uu-kepailitan--lindungi-kurator>. diunduh pada tanggal 5 Juli 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5093a08c177a1/revisi-uu-kepailitan--lindungi-kurator>. Diunduh pada tanggal 27 Juni 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl738/tugas-tugas-kurator-dan-pengawas>, diunduh pada tanggal 29 juni 2016

<https://junetbungsu.wordpress.com/2012/11/21/pemberesan-dalam-kepailitan>, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2016.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJla2k3cnOAhXGq48KHd4FB6oQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fputusan.mahkamahagung.go.id%2Fputusan%2Fdownloadpdf%2Fff6061e3fa0dec8e96db8725d4e4cf6a%2Fpdf&usq=AFQjCNF_rLAsJ8oWIOvTMV2mpyu38Md_rg&sig2=n9An2kIWGwtq8OyyhZgRA, diunduh pada tanggal 18 agustus 2016

<http://www.kompasiana.com/tobing/inilah-eksepsi-lengkap-kurator-jandri-di-pn-surabaya>, diunduh pada tanggal 17 agustus 2016

<http://www.kompasiana.com/hpinstitute/pelajaran-dibalik-pailit-batavia-air-bagian-1> diunduh pada tanggal 17 agustus 2016.

<http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/1938>, diunduh pada tanggal 27 agustus 2016.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20160620/16/559612/kurator-pt-metro-batavia-ajukan-praperadilan>, diunduh pada tanggal 17 agustus 2016.

